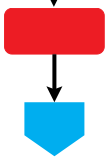
KEMENTERIAN HUKUM **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua** **Bagian Tata Usaha dan Umum**	**NOMOR SOP**	W.30.OT.02.02-23
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-06-05
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-06-06
	DISAHKAN OLEH	**Kepala Kantor Wilayah** Ditandatangani secara elektronik oleh : **Anthonius Mathius Ayorbaba**
	NAMA SOP	**PENYUSUNAN USULAN DISBURSEMENT PLAN DAN PROCUREMNT PLAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850); 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);	1. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Komputer 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Organisasi 3. Mengetahui Proses Penyusunan Program 4. Mengetahuai Aturan dan Regulasi Penyusunan Program
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Penyusunan RKA 2. SOP Penyusunan Pagu indikatif 3. SOP Penyusunan Pagu Anggaran 4. SOP Penyusunan Alokasi	1. Jaringan Internet 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Alat Komunikasi 4. Ruang Aula
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Penyusunan Usulan Disbursement Plan dan Procurement Plan Tidak Dapat Dilakukan Apabila SOP Diabaikan	Disimpan Sebagai Data Elektronik dan Manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN USULAN DISBURSEMENT PLAN DAN PROCUREMNT PLAN

No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Ketua Pokja Program dan Pelaporan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kabag Tata Usaha dan Umum Untuk Menyusun Konsep Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan					Surat Sekretaris Jenderal Tentang Pedoman Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan	15 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kakanwil	-
2	Melakukan Koordinasi Tentang Konsep Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan Dengan Para Kepala Divisi dan Kepala Bidang					Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	15 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kabag Tata Usaha dan Umum	-
3	Membuat Konsep Surat Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan serta Memberikan Arahan kepada Pelaksana untuk Pengumpulan Data Dukung Sesuai Pedoman					Surat yang telah didisposisi oleh Kabag Tata Usaha dan Umum	30 menit	Surat Pengumpulan Bahan Usulan Penyusunan Disbursement Plan danProcurement Plan oleh Ketua Pokja Program dan Pelaporan	-

No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Ketua Pokja Program dan Pelaporan	Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Mengumpulkan dan Mengkompilasi Konsep Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan					Surat Pengumpulan Bahan Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan oleh Ketua Pokja Program dan Pelaporan	3 Hari	Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I	-
5	Mengoreksi Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I					Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I	2 Hari	Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I	-
6	Mengoreksi Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I serta menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah					Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I	3 Jam	Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I Telah Disetujui	-
7	Menyetujui KKompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I Serta memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal					Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I Telah Disetujui	30 Menit	Kompilasi Usulan Penyusunan Disbursement Plan dan Procurement Plan UKE I Telah Di tanda tangani	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat

